

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BERAU

Sahuda

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sahudaasry@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan Fokus penelitian ini adalah menjelaskan proses Implementasi Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan program tersebut. Peneliti menjabarkan focus penelitian tersebut dengan pengembangan analisa teori implementasi kebijakan dari *Edward III*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1)Komunikasi, telah berjalan dengan baik. Setiap ada kebijakan dan program yang akan diimplementasikan dan menyasar UMKM, Diskoperindag selalu mensosialisasikannya terlebih dahulu. (2)Sumber Daya, Diskoperindag memiliki sumber daya yang cukup mendukung. Secara sumber daya manusia, Diskoperindag telah memiliki sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu menjadi pendamping pelaku UMKM mengatasi masalah yang mereka hadapi. Untuk sumber daya anggaran dan sarana prasarana, Diskoperindag memiliki pos anggaran yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM. (3)Disposisi, Diskoperindag melalui aparatur birokrasinya sangat mendukung suksepsi pengembangan UMKM di Berau. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan *standart operational prosedur*. (4)Struktur Birokrasi, aparatur birokrasi dari Diskoperindag telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat dalam jabatan yang mereka sandang sekarang. Kendala dalam implementasi yakni Diskoperindag kekurangan sumber daya aparatur. Selain kendala dalam aspek sumber daya aparatur, Diskoperindag memiliki keterbatasan anggaran dalam memberdayakan UMKM.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Pemberdayaan UMKM

A. PENDAHULUAN

Sektor industri dan komersial mempunyai peranan strategis dalam pembangunan perekonomian di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Berau. Hal ini terlihat dari peran pentingnya dalam memberikan peluang usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Selain itu, sektor industri dan komersial secara historis berhasil mengatasi krisis ekonomi karena karakteristiknya yang fleksibel dan penggunaan sumber daya lokal yang dapat diandalkan sehingga mendukung ketahanan ekonomi. (Informatics et al., 2022). Namun, setiap wilayah di Indonesia, seperti Provinsi Berau, mempunyai permasalahan yang berbeda-beda.

Meskipun banyak potensi usaha yang baik di daerah, namun pengembangan UMKM di daerah Berau masih banyak menghadapi tantangan, kurangnya keahlian, serta kelemahan manajemen dan sistem di daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau sejalan dengan misi Kabupaten Berau bertujuan untuk menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Berau, menarik investor serta mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia, kebijakan pembangunan. dan potensi sumber daya alam.

Misi Pemerintah Kabupaten Berau yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal menjadi suatu upaya konkret dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fokus pada pengembangan UMKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk Kabupaten Berau. Dalam menghadapi kondisi yang membaik, terdapat keinginan kuat untuk memulihkan segala sektor usaha, termasuk di dalamnya para pelaku UMKM di Kabupaten Berau. Bupati Berau, Sri Juniarsih, secara tegas menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha pariwisata dan kearifan lokal. Pada Festival UMKM Berau Ceria, Bupati menjelaskan bahwa komitmen ini direalisasikan melalui dua program prioritas, yakni pengembangan kawasan terpadu, pusat seni, budaya, dan kreativitas, termasuk kawasan UMKM terpadu, serta pemberian pembinaan, pelatihan, dan fasilitas kredit untuk UMKM. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat posisi Kabupaten Berau sebagai pendukung utama ibu kota negara di bidang pariwisata, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal agar lebih mandiri secara ekonomi. Bupati menekankan bahwa inisiatif ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan dengan memperbaiki lingkungan usaha, memastikan akses ke pasar yang lebih luas, serta memberikan pembiayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan usaha. Dalam konteks ini, Diskoperindag mencatat bahwa sektor UMKM di Kabupaten Berau mengalami perkembangan positif. Jumlah UMKM yang terdaftar di Diskoperindag mencapai 14.460 pada periode 2018 hingga 2022.

Seiring dengan pertumbuhan ini, UMKM didorong untuk terlibat dalam ekosistem yang saling terintegrasi, baik dalam skala industri dalam negeri maupun kelompok usaha. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan menghasilkan sinergi antara sektor UMKM dan pengembangan pariwisata (Sembiring & Subekti, 2021). Dengan fokus pada pembinaan dan pengembangan UMKM serta integrasi dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan komitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Melalui partisipasi aktif dalam Festival UMKM Berau Ceria, Pemerintah Kabupaten Berau berusaha mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata dan kearifan lokal. Selain mendorong peran aktif Diskoperindag Kabupaten Berau, Dekranasda Berau dan seluruh pemangku kepentingan terkait diminta terus menjalin kerja sama dalam pengembangan dan penguatan UMKM. Dukungan dan sinergi juga diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Berau menjadi landasan dan payung hukum bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Berau, dimana dalam Perda tersebut, strategi pengembangan UMKM Kabupaten Berau di jabarkan. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat daya saing masyarakat melalui pengembangan potensi sumber anggaran untuk mendukung perkembangan daerah Berau. Beberapa langkah yang diambil sebagai bagian dari Strategi Pengembangan Potensi Sumber Daya Rumah Tangga melibatkan penguatan peran lembaga yang ada di masyarakat sebagai platform partisipasi ekonomi, peningkatan kapasitas lembaga perekonomian pedesaan, dan peningkatan kualitas serta kualifikasi tenaga kerja (Rosantika, 2023). Selain itu, strategi ini juga mencakup sistem permodalan, serta perluasan lapangan kerja sebagai langkah konkret. Dalam konteks teknis, pengembangan potensi sumber daya alam, terutama perseorangan, dilakukan melalui pelaksanaan Program Kesejahteraan Hutan Bersama (PKHB), upaya penurunan emisi, dan jaminan kesejahteraan daerah. Strategi besar selanjutnya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat secara signifikan adalah melalui perluasan lapangan kerja, di mana perkebunan, khususnya produksi kelapa sawit, menjadi salah satu sektor yang diperluas (Putri, 2019). Dengan implementasi program peningkatan kegiatan perkebunan, diperkirakan akan diperlukan lebih dari 30.000 tenaga kerja terampil untuk mendukung kemajuan usaha di subsektor perkebunan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dipandang sebagai suatu proses kolaboratif yang melibatkan peran aktif dari pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat, termasuk LSM. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat adat miskin dan terpencil, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, daya saing, serta penanggulangan permasalahan sosial di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah cagar alam. (Gaol & Meidiyustiani, 2018).

Dewasa ini, dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Berau masih belum bisa berkembang secara signifikan karena ada beberapa faktor meskipun secara potensi dan dukungan kebijakan yang inklusif harusnya UMKM Berau sudah mampu memberikan kontribusi peningkatan taraf ekonomi di Kabupaten Berau. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut;

- 1) Keterbatasan akses pendanaan, salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM adalah akses terhadap pendanaan yang mencukupi. Banyak UMKM di daerah ini mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman atau modal usaha yang diperlukan untuk memperluas operasi mereka, mengembangkan produk baru, atau meningkatkan kapasitas produksi
- 2) Kurangnya infrastruktur pendukung, infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang buruk, kurangnya pasokan listrik yang stabil, serta keterbatasan akses internet, dapat menghambat kemampuan UMKM untuk beroperasi dengan efisien dan mengakses pasar yang lebih luas.
- 3) Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan wirausaha, banyak pelaku UMKM mungkin tidak memiliki keterampilan manajemen bisnis dan pengetahuan pemasaran yang memadai. Ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dengan baik, mengambil keputusan strategis, dan mengikuti tren pasar.
- 4) Kurangnya akses pasar, UMKM di daerah terpencil seperti Kabupaten Berau mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas, terutama pasar nasional atau internasional. Kurangnya distribusi yang efisien dan keterbatasan akses informasi pasar dapat membuat mereka tetap terbatas pada pasar lokal yang terbatas.
- 5) Ketidakpastian regulasi dan birokrasi, perubahan regulasi yang sering atau birokrasi yang rumit dapat membuat proses berbisnis menjadi lebih sulit dan memakan waktu. Hal ini dapat menghambat UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi secara efektif.
- 6) Kurangnya akses pelatihan dan pendampingan, program pelatihan dan pendampingan yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan keterampilan, inovasi produk, dan strategi pemasaran sering kali kurang tersedia atau belum efektif diimplementasikan.

- 7) Keterbatasan teknologi, UMKM yang kurang mengadopsi teknologi modern mungkin kesulitan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan berinovasi. Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi dan akses terhadap alat-alat digital dapat menghambat perkembangan mereka.
- 8) Persaingan yang ketat, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, UMKM mungkin menghadapi persaingan dari bisnis besar atau merek nasional/internasional. Ini bisa menjadi tantangan besar bagi UMKM dalam mempertahankan pangsa pasar.
- 9) Ketidakpastian pasar, UMKM yang bergantung pada sektor tertentu, seperti pariwisata, dapat sangat terpengaruh oleh fluktuasi pasar atau peristiwa tak terduga seperti pandemi. Ketidakpastian semacam itu dapat membuat pengembangan bisnis menjadi lebih sulit.
- 10) Kurangnya kesadaran akan branding dan pemasaran, banyak UMKM mungkin belum memahami pentingnya branding yang kuat dan strategi pemasaran efektif dalam menarik pelanggan. Ini dapat membatasi daya tarik produk mereka di pasar.

Dengan hambatan yang ada tersebut, alternatif kebijakan yang bisa dikembangkan oleh Diskoperindag Kabupaten Berau untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah tersebut (Gaol & Meidiyustiani, 2018):

- 1) Program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, mendirikan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif untuk memberikan keterampilan manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan kepada para pelaku UMKM. Pelatihan ini bisa mencakup penggunaan teknologi, pengembangan produk, dan akses ke pasar.
- 2) Fasilitasi akses pendanaan, menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan setempat untuk memfasilitasi akses pendanaan bagi UMKM, termasuk dengan menyediakan informasi mengenai pinjaman dan skema pembiayaan yang sesuai.
- 3) Pemberdayaan perempuan dan generasi muda, mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam UMKM dengan program khusus yang memberikan dukungan dan pelatihan khusus bagi kelompok ini, sehingga potensi mereka dalam dunia wirausaha dapat dimaksimalkan.
- 4) Pengembangan infrastruktur pendukung, mengupayakan perbaikan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan yang baik, pasokan listrik yang stabil, dan koneksi internet yang handal, agar UMKM dapat beroperasi secara efisien.
- 5) Penyediaan ruang usaha bersama, membangun atau menyediakan ruang usaha bersama (*co-working spaces*) untuk memfasilitasi pertemuan

kolaboratif, pertukaran ide, dan berbagi sumber daya antara pelaku UMKM.

- 6) Pengembangan pasar local, mengadakan acara pasar atau pameran rutin yang memungkinkan UMKM untuk memamerkan dan menjual produk mereka kepada masyarakat lokal, sehingga memperluas jangkauan pemasaran mereka.
- 7) Promosi produk local, mengembangkan kampanye promosi produk lokal melalui media sosial, situs web, atau media lokal lainnya untuk meningkatkan visibilitas produk-produk UMKM Berau.
- 8) Pengembangan klaster industri, mengelompokkan UMKM dalam klaster berdasarkan sektor atau jenis produk tertentu. Ini dapat memfasilitasi kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan penguatan daya saing di tingkat kelompok.
- 9) Dukungan teknologi digital, memberikan pelatihan dan dukungan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam operasi dan pemasaran UMKM, seperti pemanfaatan platform e-commerce atau pemasaran online.
- 10) Monitoring dan evaluasi program, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang teratur untuk memantau dampak dari program-program yang diluncurkan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- 11) Kolaborasi dengan pihak swasta, berkerjasama dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan yang ada dalam mendukung UMKM.
- 12) Pemberian insentif: membuat kebijakan insentif, seperti keringanan pajak atau bantuan modal, bagi UMKM yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
- 13) Pengembangan jaringan, mendorong pelaku UMKM untuk terlibat dalam asosiasi atau jaringan bisnis yang relevan, untuk berbagi informasi, pengalaman, dan peluang kolaborasi.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan mampu membantu membentuk lingkungan yang kondusif untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Berau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait dengan kendala yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Berau dan dengan strategi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Berau dalam mengembangkan UMKM yang ada, maka penerapan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau untuk UMKM yang progressnya masih belum maksimal dan masih mengalami banyak permasalahan khususnya dari para pelaku usaha itu sendiri patut untuk dibedah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

George Edward III mengungkapkan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Diungkapkannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (Tachjan, 2016). Terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan guna memastikan efektivitas implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi mengacu pada cara kebijakan disampaikan kepada organisasi atau masyarakat, serta tanggapan yang diterima dari pihak terlibat. Sumber daya melibatkan ketersediaan dukungan, terutama dalam hal sumber daya manusia, dengan fokus pada kemampuan pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif (Dewi, 2019). Disposisi merujuk pada kesiapan implementor untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan sejauh mana organisasi birokrasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan sesuai dan efektif.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Berau. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses Penerapan Kebijakan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau dan mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan program tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (2014) dalam (Sahir, 2022), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*); (2) Penyajian Data (*Display Data*); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merupakan penjelasan singkat dari data dan informasi yang telah peneliti kumpulkan dan analisa sebelumnya. Menurut Edward III, kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Berau dipengaruhi oleh;

Komunikasi

Pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau merupakan hasil dari peran pemerintah, khususnya dalam memfasilitasi komunikasi di sektor-sektor tertentu guna mendukung pengembangan UMKM. Komunikasi menjadi elemen kunci dalam mencapai keberhasilan bisnis, melibatkan pertukaran informasi yang berkelanjutan. Seiring dengan ekspansi bisnis, terdapat tekanan yang semakin besar pada perusahaan untuk menemukan strategi komunikasi yang efektif, terutama dalam berinteraksi

dengan para pekerja. Sejalan dengan dinamika ekonomi dan perkembangan bisnis, pengusaha memerlukan strategi komunikasi yang tepat untuk mengelola perubahan dan pertumbuhan bisnisnya, agar dapat diterima oleh masyarakat. Pertumbuhan yang pesat dalam dunia usaha menuntut para pelaku usaha di Kabupaten Berau untuk meningkatkan upaya dalam membangun komunikasi antar UMKM. Pemerintah, dalam hal ini, berperan sebagai penghubung antara para pelaku usaha untuk saling berbagi ide, konsep, dan inovasi guna mencapai perkembangan bersama. Kehadiran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau menjadi bagian penting dalam membentuk jaringan antar pelaku UMKM, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Selain itu, pemerintah juga aktif berkomunikasi dalam aspek pemasaran untuk mempromosikan produk dari para pelaku usaha tersebut.

Diskoperindag Kabupaten Berau aktif dalam memberikan dukungan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada pelatihan dan perluasan pemasaran produk. Selain itu, mereka juga berupaya memudahkan proses perizinan usaha bagi para pelaku UMKM. Dinas ini berperan dalam memberdayakan para pelaku UMKM melalui penyediaan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan memperluas jaringan pemasaran produk mereka. Kemudahan dalam pengurusan izin usaha juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan, dengan tujuan mempermudah para pelaku UMKM dalam memulai dan mengelola usaha mereka. Aktivitas ini mencerminkan komitmen Diskoperindag Kabupaten Berau dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Pengorganisasian yang efektif perlu diikuti dengan pelaksanaan kerja yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras, kecerdasan, dan kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan agar visi, misi, dan program kerja organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan kerja harus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali jika ada keadaan khusus yang memerlukan penyesuaian.

Sumber daya manusia yang sudah ada diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan peran mereka sesuai dengan keahlian dan kompetensi, sehingga dapat mencapai visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pelaku UMKM Kabupaten Berau mengakui bahwa Diskoperindag Kabupaten Berau telah memiliki sumber daya manusia di setiap tingkatan struktur organisasi yang terlibat dalam menjalankan programnya. Ini dianggap sebagai langkah positif dalam memberdayakan masyarakat Berau, khususnya pelaku usaha, karena dapat memastikan bahwa pemberdayaan berjalan efektif. Keputusan Diskoperindag Kabupaten Berau untuk mengambil serius dalam memberdayakan para pelaku UMKM tercermin dalam kinerja terstruktur dari aparatur, yang membantu

memastikan bahwa upaya memberdayakan pelaku UMKM dapat berjalan secara optimal.

Komunikasi organisasi melibatkan proses pembuatan dan pertukaran pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung untuk mengatasi lingkungan yang dinamis. Peran penting komunikasi organisasi adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen di dalam suatu organisasi. Kemajuan teknologi dan informasi turut memengaruhi perkembangan pelaku usaha di Kabupaten Berau, sehingga pelatihan yang diberikan pemerintah kepada mereka mengenai teknologi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Inisiatif pemerintah untuk memberikan pelatihan dalam pemasaran produk usaha dengan memanfaatkan teknologi adalah langkah strategis dalam mendukung pengembangan usaha para pelaku UMKM, sekaligus mengakomodasi mereka terhadap era pemasaran digital.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan mengenai interaksi antar organisasi dan kegiatan pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Berau, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskoperindag) Kabupaten Berau telah mengimplementasikan sejumlah strategi. Salah satunya adalah melalui penyiapan aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab di setiap bidang, serta penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut. Selanjutnya, pemerintah juga berperan sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi dalam kegiatan usaha para pelaku UMKM. Berikut adalah rincian kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh Diskoperindag.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, termasuk pesan, ide, dan gagasan, dari satu entitas kepada entitas lainnya. Umumnya, komunikasi dilakukan melalui kata-kata atau lisan, memfasilitasi pemahaman mutual antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan umum dari kegiatan komunikasi adalah untuk mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Pentingnya komunikasi sangat terlihat dalam konteks kebijakan publik, di mana keberhasilannya sering kali bergantung pada kemampuan menyampaikan informasi dengan efektif. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang mereka kerjakan serta mentransmisikan kepada bagian lainnya secara tepat, akurat dan konsisten. Menurut simpulan peneliti bahwa ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan kepada para pemangku keentingan yakni pelaku UMKM, serta pemerataan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM demi meningkatkan produktifitas dan profitabilitas UMKM. Dengan begitu komunikasi harus terjalin dengan baik agar tercapainya tujuan dari program pemberdayaan ini.

Sumberdaya

Dalam rangka menerapkan program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau berupaya secara aktif untuk memastikan kesinambungan implementasi. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka dalam meningkatkan kualitas dan inklusivitas usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau telah melibatkan partisipasi masyarakat, terutama mereka yang telah memiliki usaha dan menjadi mitra dari dinas tersebut, sebagai langkah untuk memberikan pemahaman terkait proses pengembangan usaha. Fokus pemerintah memang membangun sumber daya terlebih dahulu agar lebih mudah mencapai tujuan dari program yang telah disusun dan akan diimplementasikan.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan disiplin ilmu dan seni yang mengelola elemen-elemen manusia (seperti bakat, keahlian, dan motivasi) sebagai aset yang mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi. Aparatur birokrasi di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau mengakui bahwa kesuksesan suatu program sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan oleh para pelaku kebijakan itu sendiri, khususnya para pegawai di lingkungan Diskoperindag Kabupaten Berau. Hasil dari pengumpulan informasi melalui wawancara penelitian dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Diskoperindag Kabupaten Berau sebagai pelaksana kebijakan. Sumber Daya Manusia, terutama dari segi jumlah, ternyata belum memadai. Lebih dari sekadar merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, penting bagi keberhasilan kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kehadiran pemerintah tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan, melainkan juga melibatkan peran dalam menyediakan jembatan bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Dalam konteks Kabupaten Berau, salah satu strategi yang diimplementasikan untuk memberdayakan pelaku usaha adalah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan mitra yang lebih besar. Melalui kemitraan ini, para pelaku usaha dapat bekerja sama dalam berbagai aspek, termasuk pemasaran dan pendanaan. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau juga menjalin kerjasama dengan perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah tersebut untuk mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi ini

mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan hingga pendampingan dalam pemasaran, serta penyediaan modal bagi UMKM yang terlibat.

Pemerintah berupaya mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mempertimbangkan secara menyeluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemberdayaan berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya modal, dalam konteks ini, tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga mencakup barang modal seperti peralatan, mesin, dan fasilitas fisik. Dalam definisinya yang paling luas, modal mencakup segala hal yang telah dihasilkan dan akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Sumber daya modal melibatkan sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang lain, seperti uang, bahan mentah, mesin, perkakas, dan sejenisnya. Permasalahan modal menjadi salah satu hambatan utama dalam kegiatan usaha masyarakat di Kabupaten Berau, dan inilah yang menjadi fokus Diskoperindag Kabupaten Berau untuk memaksimalkan kegiatan usaha masyarakat.

Diskoperindag Kabupaten Berau menempatkan ketersediaan modal sebagai aspek paling fundamental yang perlu diperhatikan. Dalam upayanya memaksimalkan potensi yang ada, Diskoperindag Kabupaten Berau berusaha memastikan bahwa para pelaku usaha memiliki akses ke modal yang diperlukan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Sebagai sektor riil yang dapat bertahan di tengah dinamika makro ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diakui sebagai bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Meskipun jumlah karyawan dalam UMKM lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan besar, keberhasilannya tidak lepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas yang mampu bersaing dalam pasar global saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan UMKM, di mana pelaku UMKM di Kabupaten Berau menerima pelatihan dari Diskoperindag. Pelatihan ini tidak hanya menekankan aspek pemasaran, tetapi juga memberikan panduan mengenai pembuatan produk yang menarik perhatian masyarakat, termasuk strategi kemasan yang dapat meningkatkan daya tarik produk.

Keterlibatan pemerintah Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha memiliki dampak positif, mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terlihat dalam hasil observasi penulis terkait kebijakan Diskoperindag dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau. Dalam aspek sumber daya, fokus pemberdayaan UMKM mengacu pada

ketersediaan sumber daya manusia dan modal. Sebagai contoh, dalam program pemberdayaan UMKM, kualitas pegawai Diskoperindag Kabupaten Berau dianggap baik, meskipun jumlahnya masih kurang. Adapun dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, persaingan global, dan tren digital, diperlukan peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas melalui pembelajaran dan pelatihan.

Dengan luasnya wilayah Kabupaten Berau dan jumlah UMKM yang signifikan (sekitar 15 ribu UMKM), jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau masih belum mencukupi untuk memberikan pembinaan yang menyeluruh ke lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sumber daya manusia dalam lingkungan Diskoperindag atau kerjasama dengan instansi Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Berau. Kolaborasi dengan pihak non-pemerintah, seperti perusahaan-perusahaan lokal, juga dianggap sebagai solusi potensial untuk memperkuat pemberdayaan UMKM. Pemahaman yang disampaikan kepada pelaku usaha tentang manajemen usaha yang efektif juga turut memudahkan pengembangan usaha mereka. Selanjutnya, ketersediaan modal menjadi faktor penentu bagi perkembangan usaha para pelaku UMKM, dan keberhasilan pemerintah dalam memastikan ketersediaan modal menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan usaha UMKM di daerah tersebut.

Disposisi

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mendorong kemandirian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Keberhasilan implementasi kegiatan UMKM di Kabupaten Berau dapat diatribusikan kepada kerjasama yang kuat antara aparatur birokrasi dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau. Fokus utama pada pelaksanaan kebijakan melibatkan baik organisasi formal maupun organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Pentingnya hal ini dikarenakan kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para pelaksana kebijakan. Ini berkaitan dengan kebutuhan akan pendekatan yang tepat sesuai dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Beberapa kebijakan mungkin menuntut pelaksana kebijakan yang disiplin dan ketat, sementara pada konteks lain,

diperlukan pendekatan yang demokratis dan persuasif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan peran masing-masing pelaksana kebijakan. Dalam konteks Diskoperindag Kabupaten Berau, para aparatur diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Hal ini menjadi dasar semangat kerja bagi aparatur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan hasil observasi lapangan, tergambar bahwa aparatur pelaksana dari Diskoperindag Kabupaten Berau memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan perekonomian melalui kegiatan UMKM. Dengan demikian, pemberdayaan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penting bagi aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengikuti standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan. Sebagai pelaksana kebijakan, aparatur pemerintahan dari Diskoperindag Kabupaten Berau diharapkan memiliki acuan yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskoperindag Kabupaten Berau menegaskan kepada seluruh aparat birokrasinya untuk selalu memperhatikan standar pelayanan guna memastikan keberhasilan program yang dijalankan. Dengan demikian, setiap program dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UMKM sangat bergantung pada tingkat profesionalitas para aparatur birokrasi dan ketaatan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah pemahaman yang jelas tentang konsekuensi setelah kebijakan diberlakukan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Pemahaman ini mencakup upaya administratif dan dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dipegang oleh Diskoperindag Kabupaten Berau. Upaya mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan UMKM mendapat apresiasi positif dari para pelaku UMKM. Masyarakat menilai tinggi pemahaman pemerintah, terutama Diskoperindag, terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung pemberdayaan ini. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa mereka puas dengan pelaksanaan program yang telah dirancang oleh Diskoperindag Kabupaten Berau. Dengan demikian, pemerintah, melalui Diskoperindag, mendapatkan dukungan positif dari pelaku UMKM dalam upaya mereka untuk memberdayakan

pelaku usaha. Berikut adalah daftar kegiatan pemberdayaan yang telah diimplementasikan oleh Diskoperindag bersama para pelaku UMKM di Kabupaten Berau.

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Berau berhasil dilakukan melalui strategi yang tepat. Pelaksana kebijakan telah secara menyeluruh memahami seluruh proses yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat. Para pelaksana kebijakan dari Diskoperindag Kabupaten Berau dinilai berhasil dalam mengimplementasikan program pemberdayaan UMKM di wilayah tersebut, yang kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan UMKM. Hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Berau tercermin dalam proses kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab mereka. Kebijakan ini berhasil diimplementasikan karena struktur birokrasi bekerja sesuai dengan standar operasional pelayanan, menyempurnakan proses implementasi kebijakan tersebut.

Sikap para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai efektivitas, para pelaksana kebijakan tidak hanya perlu mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, tetapi juga harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakannya, sehingga dapat menghindari terjadinya bias dalam praktiknya. Kualitas pemberdayaan oleh pelaksana kebijakan menjadi faktor penentu untuk mencapai hasil yang diinginkan di lapangan.

Hal ini merujuk pada implementasi kebijakan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Berau, yang dianggap sebagai instrumen penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Salah satu tujuan tersebut mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan bentuk organisasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, birokrasi dipahami sebagai suatu sistem otoritas yang disusun secara rasional melalui berbagai peraturan untuk mengatur dan mengorganisir pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Fokusnya adalah pada pelaksanaan program pemberdayaan, Diskoperindag memberlakukan *standart operating procedure* (SOP) dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Berau menjadi landasan dan payung hukum bagi pengembangan

UMKM di Kabupaten Berau, dimana dalam Perda tersebut, strategi pengembangan UMKM Kabupaten Berau di jabarkan.

Untuk mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan, perlu menetapkan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya mencerminkan penilaian terhadap sejauh mana standar dan sasaran tersebut berhasil tercapai. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 tahun 2015 mengenai Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah tersebut. Peraturan tersebut mengatur peran Diskoperindag Berau serta tugas dan fungsinya dalam memberikan pembinaan kepada UMKM di Berau.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, organisasi pelaksana perlu bersiap dan memikul tanggung jawab terhadap proses implementasi tersebut. Jika organisasi pelaksana tidak siap, maka pelaksanaan kebijakan UMKM tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, organisasi pelaksana kebijakan UMKM di Kabupaten Berau adalah Diskoperindag. Dalam menjalankan kebijakan UMKM, tanggung jawab pelaksanaan lebih tepatnya diserahkan kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diamanahkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 10 tahun 2009 mengenai tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Berau.

Peran Kepala Bidang Koperasi dan UMKM memiliki signifikansi yang besar dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Berau. Semua aspek yang terkait dengan UMKM menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Koperasi dan UMKM beserta stafnya. Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan UMKM, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM memiliki kewajiban untuk menyusun bahan, merumuskan kebijakan teknis, serta melibatkan diri dalam proses pelaporan dan evaluasi di bidang koperasi dan UMKM.

Bidang Koperasi dan UMKM memiliki cakupan tugas yang mencakup berbagai aspek, seperti menciptakan lingkungan usaha yang mendukung untuk UMKM, menyediakan pendanaan dan sumber daya keuangan, menetapkan syarat dan prosedur pemenuhan kebutuhan dana, mengelola persaingan, merancang prasarana, menyediakan informasi, mengelola kemitraan, mengurus perizinan, memberikan perlindungan, serta memberikan bimbingan dan dukungan untuk pengembangan usaha, produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan memfasilitasi adopsi dan penggunaan teknologi (Astakoni et al., 2019). Dalam mendukung implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM menciptakan program-program yang bertujuan

untuk mengembangkan sektor koperasi dan UMKM. Program-program ini mencakup penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha seperti kemitraan dengan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta pelatihan kewirausahaan untuk siswa SMA dan SMK. Selain itu, mereka juga memberikan bantuan dalam hal kemitraan untuk memperoleh modal bagi pelaku UMKM.

Peran Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dalam program tersebut adalah sebagai fasilitator dan koordinator. Sebagai fasilitator, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM bertugas memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM agar mereka dapat memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut. Di samping peran sebagai fasilitator, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM juga berfungsi sebagai koordinator, mengkoordinasikan kebutuhan para pelaku UMKM melalui proses perencanaan partisipatif. Selain itu, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM juga memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pengembangan UMKM, seperti berkolaborasi dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk membantu mendapatkan modal bagi pelaku UMKM.

Kelancaran program-program yang telah dirancang oleh Bidang Koperasi dan UMKM sangat bergantung pada keberadaan sumber daya manusia pendukung yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Bidang tersebut. Dalam konteks pemberdayaan UMKM di Berau, implementasi kebijakan menghadapi tantangan yang berasal dari permasalahan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman dari para staf. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia pendukung menyebabkan bidang lain harus turut serta dalam mengeksekusi program yang berasal dari Bidang Koperasi dan UMKM. Hal ini mengakibatkan staf yang terlibat dalam pelaksanaan program kurang memahami secara mendalam permasalahan lapangan karena tindakan yang dilakukan tidak selalu sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang sesuai dengan jabatan yang mereka emban.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari implementasi program pengembangan UMKM di Kabupaten Berau dipengaruhi oleh aspek modal dan sumber daya manusia. Jadi, aspek modal berdasarkan jawaban dari *interview guide* yang telah dipaparkan bahwa memang ada kendala pada modal jika dilihat dari UMKM yang bermitra dengan Diskoperindag Berau, tetapi sebenarnya dari pihak Diskoperindag sendiri memiliki pos anggaran yang cukup untuk memberdayakan UMKM tapi belum mampu mencakup keseluruhan UMKM di Berau dan Diskoperindag juga bertekad untuk realisasi kebijakan kredit lunak untuk UMKM. Diskoperindag Kabupaten Berau memiliki beberapa program pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan

pendampingan secara langsung. Hal tersebut positif untuk meningkatkan kualitas UMKM di Kabupaten Berau, namun yang menjadi masalah adalah dalam implementasi program tersebut, pihak Diskoperindag kabupaten Berau kekurangan sumber daya aparatur.

E. PENUTUP

Proses implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Berau sudah cukup berhasil. Keberhasilan proses tersebut tercermin dari aspek komunikasi dimana program Diskoperindag disosialisasikan terlebih dahulu ke UMKM, aparatur birokrasi juga konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai struktur jabatan dan standart operasional procedure yang sudah ditetapkan. Untuk faktor yang masih menjadi penghambat adalah faktor sumber daya yakni sumber daya manusia dan sumber daya anggaran (modal).

DAFTAR PUSTAKA

- Astakoni, I. M. P., Sunata, I. G. N., Swaputra, I. B., & Nursiani, P. (2019). *Pemberdayaan UMKM Melalui Penataan Stasiun Kerja Peremajaan Fasilitas Produksi dan Manajemen Usaha*. 3(1), 84–89.
- Dewi, D. S. K. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi*. UM Jakarta Press, 268.
- Gaol, D. F. L., & Meidiyustiani, R. (2018). Model pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam revitalisasi kampung tekstil. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2622–2191), 79–95.
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/6>
- Informatics, F., Dedication, E., Wisudawati, T., Agusti, F., & Utomo, W. P. (2022). *Pendampingan Dalam Penataan Letak Fasilitas Di UMKM Fuji Rotan Trangsan Gatak Sukoharjo*. 1(2), 141–149.
- Putri, E. R. A. (2019). *EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PADA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SURABAYA (Studi Kasus:*

Taman Bungkul Kota Surabaya). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 05, September (2023) e-ISSN: 2797-0469, 2(05), 179–186.

Rosantika. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI TAMAN PINANG INDAH SIDOARJO. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 06, Nopember (2023) e-ISSN: 2797-0469, 4(1), 88–100.

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.

Sembiring, R. A., & Subekti, T. (2021). Analisis Aktor dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu untuk Kualitas Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.30416>

Tachjan, H. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.